



Pemindahan Ibu Kota Baru Jawa Barat: Altruisme versus Non-Altruisme

Asterina Nurhermaya¹, Marisa Sugangga²

^{1,2}Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

| Diterima 16 Juni 2020 | Disetujui 12 Oktober 2020 | Diterbitkan 1 Desember 2020 |
| DOI <https://doi.org/10.32315/10.32315/jlbi.v9i4.50> |

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memindahkan ibu kota Provinsi Jawa Barat dari kota Bandung ke tempat lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kota Bandung sudah terlalu padat dan tidak layak menjadi pusat pemerintahan. Namun, masyarakat pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemikiran masyarakat yang setuju dan tidak setuju, serta menyusun model hipotesis pengelompokan pendapat tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner daring yang berisi pertanyaan terbuka. Data teks yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten konvensional (*conventional content analysis*). Dari hasil analisis terungkap dua kelompok pendapat. Pendapat yang setuju cenderung altruisme dan pendapat yang tidak setuju cenderung non- altruisme. Altruisme adalah kelompok yang mengutamakan kemajuan kota lain. Non-*altruisme* adalah kelompok yang mengutamakan kemajuan kota Bandung.

Kata-kunci : altruisme, analisis konvensional, non-altruisme, pemindahan ibu kota

The Relocation of West Java Capital City: Altruism versus Non-Altruism

Abstract

The West Java Provincial Government is planning to move the capital city of West Java from Bandung City to another location. The West Java Provincial Government considers that Bandung is too crowded and is not suitable to be the center of the government. However, the public has mixed opinions about this policy. This research aims to identify the opinions of the people who agree and disagree with the policy and to form a hypothetical grouping of both opinions. The research was conducted with a qualitative approach. Data was collected by distributing an online questionnaire that contained open-question arguments. The collected data was analyzed using conventional content analysis. The analysis resulted in two opinion groups. Agreeing opinions tend to be altruistic and disagreeing opinions tend to be non-altruistic. Altruism is a group that prioritizes the progress of other cities. Non-altruism is a group that prioritizes the progress of Bandung.

Keywords: altruism, conventional content analysis, non-altruism, the relocation of capital city

Kontak Penulis

Asterina Nurhermaya
Kelompok Keilmuan Perencanaan dan Perancangan Kota, Fakultas Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10
E-mail: sterinoo@students.itb.ac.id



Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengemukakan gagasan rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke kota lain semenjak tahun 2010 [1]. Rencana tersebut muncul setelah adanya wacana mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Pemindahan tersebut dilatarbelakangi persoalan beban kota Bandung, kinerja pelayanan pemerintah, dan pemulihan kota/*city repair* [2]. Pengembangan kota baru Provinsi Jawa Barat direncanakan dengan kualitas baik, modern, serta berkelanjutan [3]. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengusulkan tiga lokasi ibu kota provinsi, yaitu Tegalluar, Walini, dan kawasan Rebana (Cirebon, Subang, dan Majalengka) [4]. Keunggulan ketiga kawasan ini adalah adanya pembangunan kereta cepat, BIJB, tol Cipali, dan tol Cisamdawu [5]. Kajian ini sudah masuk ke dalam peraturan daerah perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang RTRW Jawa Barat tahun 2009 – 2029 [6]. Dari diskursus pemindahan ibukota ini muncul ragam reaksi terkait pemindahan ibu kota Jawa Barat.

Formulasi kebijakan pemindahan ibu kota Jawa Barat yang berisi tujuan kebijakan akan masuk ke tahap implementasi kebijakan berupa sebuah tindakan. Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota akan membutuhkan proses karena implementasi ini berhubungan dengan rakyat banyak. Bentuk partisipasi masyarakat juga memiliki arti penting dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu untuk berkontribusi mencapai tujuan kelompok dalam pencapaian tujuan tersebut. Kontribusi masyarakat tersebut diimplementasikan dengan komunikasi. Melalui komunikasi, masyarakat dapat turut aktif dalam penuangan pemikiran mengenai pemindahan ibu kota Jawa Barat. Hal ini mencakup usaha untuk mengetahui alasan dan dampak nyata yang dipahami dari perspektif masyarakat. Penelitian ini mencoba membuka pintu komunikasi dengan cara menampung pemikiran masyarakat melalui kuesioner secara daring.

Metode

Pada tahap pertama, penelitian menggunakan metode kualitatif [7] dengan pendekatan analisis konten konvensional [8]. Metode analisis konten

konvensional digunakan untuk studi yang tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena [9]. Fenomena yang dimaksud dalam kasus ini adalah fenomena pemindahan ibu kota Jawa Barat. Metode penelitian yang dilakukan adalah terdiri atas metode pengumpulan data dan analisis data.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner daring yang berisi pertanyaan terbuka (*open-ended*) [10]. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk daring [11]. Data yang dikumpulkan merupakan data teks yang bersifat kualitatif. Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri atas pertanyaan pendapat setuju atau tidak setuju, alasan menjawab setuju dan tidak setuju, dampak positif, dan dampak negatif terhadap pemindahan ibu kota Jawa Barat. Pengumpulan data responden dilakukan selama satu minggu di bulan September 2019. Kuesioner ini dibagikan kepada teman dan keluarga. Responden berasal dari beragam pulau di Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Bali. Namun, berdasarkan hasil pengumpulan data bahwa mayoritas responden berasal dari Jawa, terutama yang berasal dari Jawa Barat. Data yang sudah berhasil terkumpul sejumlah 100 responden. Seluruh hasil responden digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis data.

Metode Analisis Data

Data teks yang telah terkumpul dilanjutkan ke tahap analisis. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan sistem *coding*. Sistem *coding* di dalam analisis isi adalah alat penerjemah untuk mengorganisir data yang besar menjadi kategori yang lebih sedikit. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu *open-coding*, *axial-coding*, dan *selective-coding* [6]. Tahap *open-coding* yaitu tahap untuk membuat identifikasi kata kunci dari jawaban responden dan mengelompokkannya ke dalam kategori. Hasil dari tahap ini berupa distribusi frekuensi. Tahap awal penelitian diawali dengan mengumpulkan kata kunci yang berasal dari jawaban responden melalui analisis *open coding*. Jawaban responden yang dilakukan dengan analisis *open-coding* adalah alasan, dampak positif, dan dampak negatif pemindahan ibu kota Jawa Barat. Berikut adalah salah satu jawaban responden mengenai alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat:

“Karena **Bandung** untuk saat ini sudah mulai **padat** dan mungkin ini adalah kesempatan untuk **kota lain** agar lebih **berkembang**.” (Responden47). Dari hasil tanggapan responden tersebut, maka diambil dua kata kunci utama yang dapat dilihat pada tabel satu,

Tabel 1. Pemberian kata kunci dan kategori dari jawaban alasan pemindahan Ibukota Jawa Barat

No.	Tanggapan Responden	Kode	Kategori
47	Karena Bandung untuk saat ini sudah mulai padat dan mungkin ini adalah kesempatan untuk kota lain agar lebih berkembang	1. Bandung padat 2. Kota lain berkembang	1. Kepadatan 2. Pemerataan Pembangunan

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pemberian kata kunci alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat, terdapat 153 variasi kata kunci responden mengenai alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat. Variasi kata kunci alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat dikelompokkan menjadi 13 kategori, yaitu *aksesibilitas* (6), *belum prioritas* (13), *durasi* (3), *ekonomi* (26), *fasilitas kota* (8), *identitas kota* (27), *inststitusi pemerintah* (3), *kajian* (6), *kapasitas* (18), *pemerataan pembangunan* (12), yaitu ‘Bandung padat’ dan ‘Kota lain berkembang.’ Dua kata kunci tersebut disederhanakan menjadi dua kategori. Bandung sudah mulai padat dikategorikan sebagai kepadatan dan kesempatan kota lain agar berkembang termasuk pada kategori pemerataan pembangunan. Pemberian kata kunci dan kategori diberlakukan pada seluruh hasil responden. Tahap ini dapat mengidentifikasi pengelompokkan kata yang serupa dari masing – masing tanggapan responden.

Berdasarkan pemberian kata kunci alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat, terdapat 153 variasi kata kunci responden pada alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat. Variasi kata kunci alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat dikelompokkan menjadi 13 kategori, yaitu *aksesibilitas* (6), *belum prioritas* (13), *durasi* (3), *ekonomi* (26), *fasilitas kota* (8), *identitas kota* (27), *inststitusi pemerintah* (3), *kajian* (6), *kapasitas* (18), *pemerataan pembangunan* (12), *tata kota* (2), dan

transportasi (12). Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa alasan utama setuju dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah karena faktor transportasi. Sedangkan alasan utama tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah karena faktor identitas kota. Selain alasan pemindahan ibu kota, dikaji juga mengenai dampak terhadap pemindahan ibu kota Jawa Barat. Hal ini untuk mengetahui hubungan antara alasan dan dampak pemindahan ibu kota Jawa Barat.

Selanjutnya adalah tahap *axial-coding*. Tahap ini bertujuan untuk membuat hubungan antar kategori sebagai hasil dari tahap *open-coding*. Hasil tahap ini berupa dendrogram *cluster* yang digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu *selective-coding*. Tahap *selective-coding* yaitu tahap untuk menyusun model hipotesis yang didapatkan dari hasil tahap *axial-coding* dimana tahap ini dilakukan dengan menganalisis korespondensi antara pendapat pemindahan dengan alasan serta dampak pemindahan. Setiap hasil *selective-coding* memiliki nilai akurasi yang dinamakan dengan *p-value*. *Tata kota* (2), dan *transportasi* (12). Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa alasan utama setuju dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah karena **faktor transportasi**. Sedangkan alasan utama tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah karena **faktor identitas kota**.

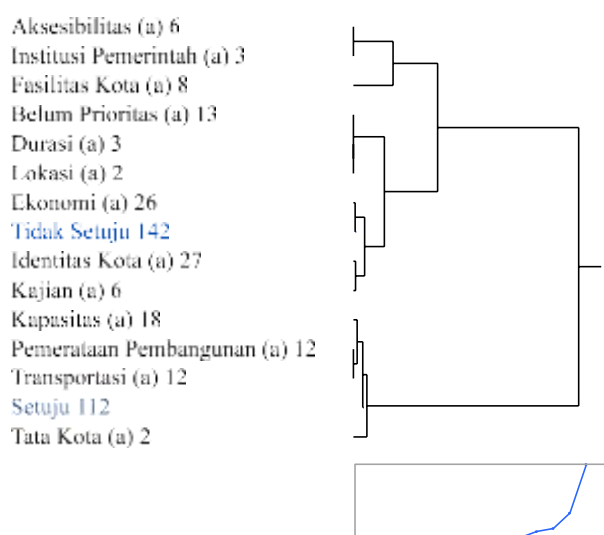


Diagram 1. Dendrogram korespondensi antara pendapat tentang pemindahan ibukota Jawa Barat dan alasannya. *p-value* <0.0001

Berdasarkan pemberian kata kunci dampak positif pemindahan ibu kota Jawa Barat, terdapat 126

variasi kata kunci responden pada dampak positif pemindahan ibu kota Jawa Barat. Kata kunci tersebut dikelompokkan ke dalam 10 kategori, yaitu *pembangunan* (28), *identitas kota* (6), *kapasitas* (21), *transportasi* (21), *tata kota* (8), *fasilitas kota* (6), *institusi pemerintah* (3), *lingkungan* (6), *ekonomi* (9), dan *tidak ada* (8). Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa dampak positif utama pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah faktor pembangunan.

Berdasarkan pemberian kata kunci dampak negatif pemindahan ibu kota Jawa Barat, terdapat 126 variasi kata kunci responden pada dampak negatif pemindahan ibu kota Jawa Barat. Kata kunci tersebut dikategorikan ke dalam 15 kategori, yaitu *administrasi* (3), *aksesibilitas* (1), *durasi* (8), *ekonomi* (64), *fasilitas kota* (6), *identitas kota* (5), *kajian* (8), *kapasitas* (1), *mobilisasi* (4), *pembangunan* (2), *sosial* (5), *sumber daya* (4), *tata kota* (4), *transportasi* (3), dan *tidak tahu* (6). Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa dampak negatif utama pemindahan ibu kota Jawa Barat adalah faktor ekonomi.

Tahap selanjutnya adalah analisis *selective coding*. Tahap ini dilakukan dengan analisis antara pendapat dan tiga aspek, diantaranya adalah analisis korespondensi antara pendapat pemindahan ibukota Jawa Barat dan alasan, korespondensi pendapat pemindahan ibukota Jawa Barat antara alasan dan dampak positif, dan korespondensi pendapat pemindahan ibu kota Jawa Barat antara alasan dan dampak negatif. Analisis Hasil Korespondensi antara Pendapat dan Alasan Pemindahan Ibukota Jawa Barat

Diagram 1 menunjukkan hasil korespondensi kategori antara pendapat dan alasan mengenai pemindahan ibu kota Jawa Barat. Menurut responden yang setuju, terdapat 4 kategori alasan, diantaranya adalah *kapasitas* (18), *pemerataan pembangunan* (12), *transportasi* (12), dan *kapasitas* (6). Responden yang setuju cenderung memikirkan permasalahan kota Bandung. Diketahui bahwa permasalahan utamanya dari segi transportasi yaitu karena kemacetan. Sebagian masyarakat kota Bandung tidak menjadikan transportasi publik sebagai transportasi utama bagi masyarakat kota Bandung. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kualitas *headway* dan waktu tempuh transportasi publik yang tidak dapat diandalkan, mulai

berkembangnya layanan transportasi online, pengalaman negatif yang dirasakan pengguna sehingga enggan menggunakan transportasi publik [12]. Sementara itu, pemindahan ibu kota diperlukan untuk pemerataan pembangunan agar kota lain berkembang. Di sisi lain, kapasitas penduduk kawasan metropolitan kota Bandung semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk tersebut tidak diiringi dengan laju pertumbuhan fisik perkotaan. Kota Bandung terus berkembang dan memberikan dampak pertumbuhan urban sprawl yang tidak terkendali pada penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian [13]. Kota Bandung juga dinilai responden sudah sulit penataannya. Persepsi responden dapat diartikan bahwa dengan adanya pemerataan pembangunan kota lain dapat mengurangi beban kota Bandung yang semakin padat dan sulit penataannya. Seperti halnya rencana penataan kembali kota Bandung terkait pengembangan kawasan TOD di sebagian wilayah metropolitan Bandung, namun prasyarat perencanaan yang belum teridentifikasi secara jelas [14]. Persepsi responden dapat diartikan bahwa pemerataan pembangunan kota lain dapat mengurangi beban kota Bandung yang semakin padat dan sulit penataannya.

Menurut responden yang tidak setuju, terdapat 9 kategori alasan, diantaranya adalah *ekonomi* (26), *identitas kota* (27), *kajian* (6), *belum prioritas* (13), *durasi* (3), *lokasi* (2), *fasilitas kota* (8), *aksesibilitas* (6), dan *institusi pemerintah* (3). Responden yang tidak setuju cenderung memikirkan faktor ekonomi. Alasannya adalah karena pemindahan ibu kota akan mengeluarkan banyak biaya dimana lebih baik biaya tersebut untuk hal lain. Selain itu, Bandung juga masih layak menjadi ibu kota karena identitas kota Bandung sebagai pusat aktivitas. Konsep identitas dari sudut pandang kota mencakup definisi yang luas meliputi konsep budaya dan sosial yang menunjukkan keragaman dari sudut pandang kota dan produk arsitektur [15]. Menurut pengamatan responden, identitas Bandung terbentuk dari komponen sejarah, konsep kota yang ikonik, letak geografis yang nyaman, dan pencerminan kota yang rapi.

Pakar perencanaan wilayah dan kota, Johnny Patta, menyarankan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji rencana pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat lebih dalam [1]. Responden juga memiliki pendapat yang sama, yaitu Bandung harus berbenah kembali dan

melakukan pengkajian ulang. Pemindahan ibu kota tentu menimbulkan efek yang tidak dapat terpisahkan dari terjadinya perubahan sosial, ekonomi, koeksistensi ruang kota [16]. Pemindahan ibu kota ini dinilai responden belum prioritas melihat lokasi Bandung masih strategis sebagai ibu kota dan pemindahan ibukota baru akan membutuhkan waktu yang lama.

Responden lain juga berpendapat bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat, aksesibilitas menuju ibukota baru akan jauh, sedangkan fasilitas kota Bandung masih memadai, terutama untuk fasilitas pemerintahan. Faktor lain yang menjadi alasan responden yang tidak setuju adalah terjadinya penurunan efektivitas kinerja pemerintahan.

Analisis Hasil Korespondensi antara Pendapat dan Dampak Positif Pemindahan Ibukota Jawa Barat

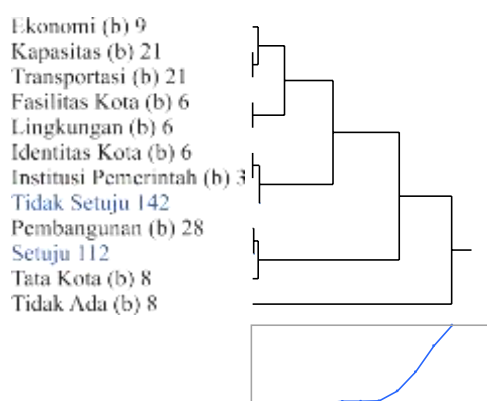


Diagram 2. Dendrogram Korespondensi antara Pendapat tentang Pemindahan Ibukota Jawa Barat dan Dampak Positif. P-value 0.2

Diagram 2 menunjukkan analisis korespondensi kategori yang dilakukan antara pendapat dan dampak positif pemindahan ibu kota. Menurut responden yang setuju, terdapat dua kategori dampak positif, diantaranya adalah *pembangunan* (28) dan *tata kota* (8). Kategori responden yang setuju memiliki pendapat utama bahwa pemindahan ini akan berdampak positif pada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pemerataan pembangunan, ekonomi, pendidikan, penduduk, sumber daya alam, dan kualitas hidup kota baru. Hal tersebut juga terjadi di seluruh dunia selama bertahun – tahun bahwa dengan diciptakannya ibu kota baru adalah sebagai inisiatif pembangunan bangsa serta pembangunan regional serta ekonomi [17]. Selain itu, dampak positif lainnya adalah Bandung dapat lebih tertata dan kota baru lebih

berkembang. Salah satunya adalah adanya upaya kota yang mengembangkan kota dengan pemanfaatan konsep smart city sebagai transisi cerdas peningkatan modal sosial kota dan komunitas setempat [18].

Menurut responden yang tidak setuju, terdapat tujuh kategori dampak positif, diantaranya adalah *institusi pemerintah* (3), *transportasi* (21), *kapasitas* (21), *ekonomi* (9), *lingkungan* (6), *identitas kota* (6), dan *instiusi pemerintah* (3). Responden yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota Jawa Barat berpendapat bahwa dampak positif utamanya adalah bagi institusi pemerintah. Responden berpendapat bahwa pemerintah daerah dapat lebih fokus mengelola kota Bandung saja dan tidak fokus pada pencitraan melalui program pemindahan ibu kota baru. Dampak positif lainnya adalah dari segi transportasi. Menurut responden, dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat, lalu lintas di kota Bandung menjadi tidak padat. Sementara itu, dampak positif lainnya dari segi kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah kepadatan penduduk di kota Bandung dapat berkurang.

Dari segi ekonomi, anggaran pemindahan dapat digunakan untuk menata kembali kota Bandung. Sementara itu, adapun dampak pemindahan ibu kota terhadap lingkungan. Kota Bandung yang dihadapkan alih fungsi lahan secara masif mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau, kini dapat dijadikan prioritas pembangunan kembali [19]. Kepadatan penduduk dan lalu lintas yang berkurang juga mampu berkontribusi pada berkurangnya polusi di Bandung. Dari sisi lain bahwa dampak positif lainnya dapat membawa fasilitas kota Bandung tetap terjaga dan terpelihara. Beberapa responden juga berpendapat bahwa tidak adanya dampak positif bagi pemindahan ibu kota Jawa Barat.

Analisis Hasil Korespondensi antara Pendapat dan Dampak Negatif Pemindahan Ibukota Jawa Barat

Hasil analisis korespondensi lainnya adalah korespondensi antara pendapat pemindahan ibu kota Jawa Barat dan dampak negatifnya. Menurut responden yang setuju, terdapat 4 kategori dampak negatif diantaranya adalah *sosial* (5), *fasilitas kota* (6), *administrasi* (3), dan *sumber daya* (4). Menurut responden yang setuju, dampak negatif utama pemindahan ibukota Jawa Barat akan menyebabkan konflik sosial. Konflik tersebut

dapat terjadi karena adanya perubahan kepentingan dan kebutuhan antar wilayah. Di sisi lain, fasilitas dan utilitas perkotaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat perkotaan. Sehingga masyarakat berpendapat mengenai kekhawatiran kota baru belum memiliki fasilitas kota yang memadai. Hal yang berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik akan turun dan pemindahan ibu kota membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Kategori responden yang tidak setuju pada dampak negatif diantaranya adalah berkaitan dengan *durasi* (8), *ekonomi* (6), *transportasi* (3), *mobilitasi* (4), *tata kota* (4), *tidak tahu* (6), *aksesibilitas* (1), *pembangunan* (2), *identitas kota* (5), *kapasitas* (1), dan *kajian* (8). Responden yang tidak setuju berpendapat bahwa pemindahan ibu kota baru Jawa Barat akan berdampak negatif dari segi kajian. Maksud dari kategori ini adalah dibutuhkan pengkajian ulang karena akan banyak muncul permasalahan baru dan masalah Bandung yang ditinggalkan. Sementara itu, pemindahan ibu kota Jawa Barat dapat membuat citra kota Bandung menurun. Menurut responden, pola dan struktur lingkungan fisik kota Bandung memiliki fungsi imajibilitas kota yang kuat dibanding kota lain. Dampak negatif lainnya yang terjadi adalah perekonomian Bandung akan turun yang mengakibatkan pengangguran dan anggaran daerah terbuang karena biaya pembangunan tinggi.

Perencanaan pemindahan ibu kota juga akan membutuhkan waktu (*durasi*). Adapun di dalam perencanaan makro kebijakan pemindahan ibu kota perlu dipublikasikan kepada masyarakat untuk mengetahui *timeline* pemindahan yang jelas. Selain itu, beberapa responden berpendapat bahwa pengembangan transportasi massal di Bandung akan terhambat. Hal ini dapat dikarenakan biaya akan cenderung pada pembangunan fasilitas kota baru itu sendiri. Sementara itu, tata kota Bandung pun dapat berubah, seperti kehilangan ruang terbuka dan bangunan mulai terbengkalai. Dampak negatif lain yang menjadi pertimbangan responden adalah pergerakan masif manusia ke kota baru.

Pergerakan tersebut diartikan bahwa adanya kecenderungan masyarakat memilih untuk pindah karena memiliki peluang lebih besar di kota baru. Dampak negatif lainnya yaitu pembangunan ibu

kota lama yang tertunda dan aksesibilitas warga dari kota Bandung ke kota baru yang jauh. Ketiga lokasi yang belum diketahui masyarakat akan berfikir bahwa aksesibilitas antar kota akan sulit. Beberapa responden menyatakan tidak tahu akan dampak negatif yang terjadi jika adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat. Pada akhirnya, pembuat kebijakan serta perencana tentu memerlukan kajian berupa strategi kompleks dalam perencanaan dan pembangunan kota yang memerhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan kota baru yang dituju [20].

Hasil korespondensi kategori antara pendapat dan dampak negatif mengenai pemindahan ibu kota yang terlampir pada diagram 3 dapat menunjukkan bahwa responden yang setuju dengan pemindahan ibu kota Jawa Barat diartikan sebagai kecenderungan melihat masa depan kota lain, bersifat visioner, memikirkan permasalahan yang dihadapi Bandung, melihat manfaat bagi kota lain, dan memikirkan hambatan yang ada bagi kota lain.

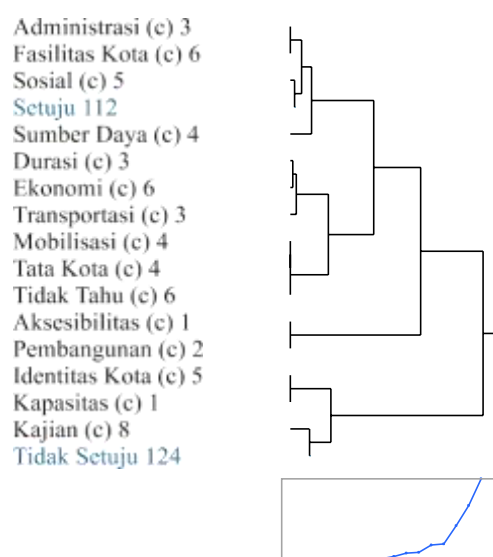
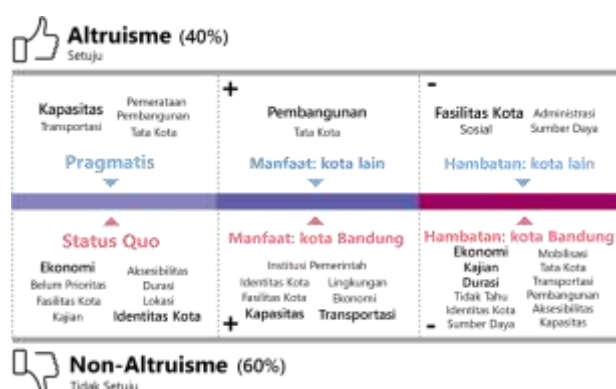


Diagram 3 Dendrogram korespondensi antara pendapat tentang pemindahan ibu kota Jawa Barat dan dampak negatif. p-value 0.2

Hal ini diartikan bahwa responden yang setuju mengutamakan solusi bagi kedua kota dengan masing – masing permasalahan atau kondisi yang dihadapi. Bagi responden yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota baru Jawa Barat cenderung melihat ke belakang, *status quo*, mementingkan manfaat bagi kota Bandung, dan memikirkan hambatan yang akan dihadapi di kota Bandung. Hal ini diartikan bahwa bagi responden untuk tetap menjaga keutuhan Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat.

Maka dari itu, penulis mengelompokkan dua kategori responden. Dua kategori ini dikelompokkan berdasarkan pendapat setuju dan tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota di Jawa Barat. Ada perbedaan antara dua kelompok ini dalam konteks pengambilan keputusan untuk kepentingan orang lain [21]. Sebutan kelompok ini memiliki dua makna yang berlawanan. Kelompok responden yang setuju merupakan kelompok yang hanya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan kota lain agar lebih berkembang. Kelompok yang hanya diarahkan demi kota lain ini disebut dengan kelompok altruisme [22].

Tabel 2. Analisis kedekatan pendapat dengan alasan, dampak positif, dan dampak negatif pemindahan ibu kota Jawa Barat



Sementara itu, kelompok responden yang tidak setuju cenderung sebaliknya. Kelompok yang tidak setuju yaitu kelompok yang tidak mengutamakan kepentingan kota lain untuk berkembang dan hanya mengutamakan perkembangan kota Bandung. Kelompok ini disebut dengan kelompok non- altruisme. Sebutan nama non-altruisme ditafsirkan dengan egoisme sebagai lawan kata altruism [23].

Kesimpulan

Selain rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Bandung ke kota lain. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pemindahan ibu kota ini sudah melalui proses dan kajian komprehensif [3]. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin politik memiliki partisipasi besar dalam perwujudan visi transformasi sebuah kota [24]. Pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat sangat memungkinkan karena tidak ada undang - undang yang mengatur kebijakan tersebut.

Dengan demikian pemerintah cukup fleksibel dalam mengatur kebijakan pemindahan ibu kota. Namun,

partisipasi masyarakat juga memiliki arti penting dalam menilai kebijakan pemerintah sebagai bentuk kepedulian masyarakat akan tujuan pembangunan. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa responden yang setuju dengan pemindahan ibu kota Jawa Barat sebesar 40% dan responden yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota Jawa Barat sebesar 60%.

Berdasarkan temuan penelitian ini maka terdapat dua kelompok besar responden dalam menanggapi pemindahan ibu kota baru Jawa Barat. Perilaku sosial ini dapat dikategorikan apakah konsekuensi bagi aktor dan penerima bermanfaat atau kontras dengan perilaku sosial lainnya yang merugikan [23]. Responden yang setuju dengan pemindahan ibu kota Jawa Barat cenderung memikirkan masalah kota Bandung dan melihat potensi pengembangan kota lain. Tabel 2 memperlihatkan analisis kedekatan pendapat dengan alasan, dampak positif, dan dampak Negatif Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat.

Sebagaimana upaya pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jawa ke Kalimantan menjadi pilihan baru untuk mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, dan sektor lain yang masih tertinggal [25]. Responden ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sifat altruisme. Kelompok altruisme digolongkan sebagai tingkah laku prososial yang dimotivasi oleh keinginan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain [26].

Sebaliknya, masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota Jawa Barat cenderung memikirkan pembiayaan dan melihat masa lalu. Kecenderungan perilaku tersebut kontras dengan bentuk perilaku sosial altruisme yang tidak efektif. Hal tersebut dapat didasari oleh beberapa motif dasar, yaitu preferensi, keyakinan pada pandangan diri sendiri (parokialisme), hingga pengaruh sosial (konformitas) [27]. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sifat non- altruisme. Kelompok non-altruisme dimaknai bahwa responden mengutamakan pengembangan kota Bandung dibandingkan dengan dampak yang akan dihadapi dari segi fisik perkotaan, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya baik bagi kota Bandung dan kota baru. Beberapa pendapat mengatakan bahwa keberadaan sifat altruisme dan non-altruisme secara empiris perlu menempuh kajian yang rumit. Meskipun begitu, diharapkan kedua kategori ini

dapat mewakili interpretasi hasil temuan penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] BBC News, "Pusat pemerintahan Jawa Barat dipindah dari Bandung, Ridwan Kamil: 'Masih blank,'" *BBC News*, Indonesia, Sep 02, 2019.
- [2] D. Ramdhani, "Ini Alasan Rencana Pusat Pemerintahan Jabar Dipindah, Sudah Muncul Sebelum Masa Ridwan Kamil," *Kompas.com*, Sep 01, 2019.
<https://regional.kompas.com/read/2019/09/01/1233651/ini-alasan-rencana-pusat-pemerintahan-jabar-dipindah-sudah-muncul-sebelum?page=all> (diakses Okt 07, 2019).
- [3] H. JABAR, "Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jawa Barat Telah Melalui Kajian Komprehensif," *bappeda.jabarprov.go.id*, 2019.
- [4] A. Lidwina, "Ridwan Kamil Sebut 3 Lokasi Ini jadi Ibu Kota Jabar," *Kata Data*, Sep 11, 2019.
- [5] K. Multimedia, "Inilah Tiga Lokasi Kandidat 'Ibu Kota' Baru Provinsi Jabar," *Kapol.id*, Jan 12, 2020.
- [6] D. V. Putsanra, "Ridwan Kamil Kaji Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat," *tirto.id*, 2019.
- [7] J. W. Creswell, *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 4th Edition 2011*, 2011 ed., vol. 148. Pearson, 2012.
- [8] M. Schreier, "Qualitative Content Analysis," in *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, U. Flick, Ed. SAGE Publications Ltd, 2014, hal. 170–183.
- [9] H. . Hsieh dan S. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qual. Health Res.*, vol. 15, no. 9, hal. 1277–1288, Nov 2005.
- [10] R. Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Longman, 2005.
- [11] Tim Kemenristekdikti, "Buku Panduan Pengisian Survey Pembelajaran dalam Jaringan," Jakarta, 2017.
- [12] M. Rizki, T. B. Joewono, P. F. Belgiawan, dan M. Z. Irawan, "The travel behaviour of ride-sourcing users, and their perception of the usefulness of ride-sourcing based on the users' previous modes of transport: A case study in Bandung City, Indonesia," *IATSS Res.*, vol. 45, no. 2, hal. 267–276, Jul 2021, doi: 10.1016/j.iatssr.2020.11.005.
- [13] V. S. Ardiwijaya, T. P. Soemardi, E. Suganda, dan Y. A. Temenggung, "Bandung Urban Sprawl and Idle Land: Spatial Environmental Perspectives," *APCBEE Procedia*, vol. 10, hal. 208–213, 2014, doi: 10.1016/j.apcbee.2014.10.040.
- [14] N. L. A. Widyahari dan P. N. Indradjati, "The Potential of Transit-Oriented Development (TOD) and its Opportunity in Bandung Metropolitan Area," *Procedia Environ. Sci.*, vol. 28, hal. 474–482, 2015, doi: 10.1016/j.proenv.2015.07.057.
- [15] E. Yaldiz, D. Aydın, dan S. B. Sramkaya, "Loss of City Identities in the Process of Change: The City of Konya-Turkey," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 140, hal. 221–233, Agu 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.413.
- [16] B. Surya, "The Processes Analysis of Urbanization, Spatial Articulation, Social Change and Social Capital Difference in the Dynamics of New Town Development in the Fringe Area of Makassar City (Case Study: In Metro Tanjung Bunga Area, Makassar City)," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 227, hal. 216–231, Jul 2016, doi: 10.1016/j.sbspro.2016.06.065.
- [17] H. Ghalib, M. T. El-Khorazaty, dan Y. Serag, "New capital cities as tools of development and nation-building: Review of Astana and Egypt's new administrative capital city," *Ain Shams Eng. J.*, vol. 12, no. 3, hal. 3405–3409, Sep 2021, doi: 10.1016/j.asej.2020.11.014.
- [18] S. Nakano dan A. Washizu, "Will smart cities enhance the social capital of residents? The importance of smart neighborhood management," *Cities*, vol. 115, hal. 103244, Agu 2021, doi: 10.1016/j.cities.2021.103244.
- [19] S. Narulita, A. F. M. Zain, dan L. B. Prasetyo, "Geographic Information System (GIS) Application on Urban Forest Development in Bandung City," *Procedia Environ. Sci.*, vol. 33, hal. 279–289, 2016, doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.079.
- [20] K. Alawadi, "Rethinking Dubai's urbanism: Generating sustainable form-based urban design strategies for an integrated neighborhood," *Cities*, vol. 60, hal. 353–366, Feb 2017, doi: 10.1016/j.cities.2016.10.012.
- [21] A. W. Schulz, "Altruism, egoism, or neither: A cognitive-efficiency-based evolutionary biological perspective on helping behavior," *Stud. Hist. Philos. Sci. Part C Stud. Hist. Philos. Biol. Biomed. Sci.*, vol. 56, hal. 15–23, Apr 2016, doi: 10.1016/j.shpsc.2015.10.006.
- [22] R. Robet, "Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial," *Masy. J. Sociol.*, vol. 18, no. 1, Jan 2013, doi: 10.7454/mjs.v18i1.4692.
- [23] E. L. Khalil, "Adam Smith and Three Theories of Altruism," *Rech. économiques Louvain*, vol. 67, no. 4, hal. 421, 2001, doi: 10.3917/rel.674.0421.
- [24] A. Ortegon-Sanchez dan N. Tyler, "Constructing a Vision for an 'Ideal' Future City: A Conceptual Model for Transformative Urban Planning," *Transp. Res. Procedia*, vol. 13, hal. 6–17, 2016, doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.002.

- [25] R. Sugihartati, D. Susilo, dan T. D. Putranto, "Discourse About the Government's Political Goal to Move the Capital of Indonesia," *International J. Innovation, Creat. Chang.*, vol. 12, no. 10, hal. 462–480, 2020.
- [26] S. Pfattheicher, Y. A. Nielsen, dan I. Thielmann, "Prosocial behavior and altruism: A review of concepts and definitions," *Curr. Opin. Psychol.*, vol. 44, hal. 124–129, Apr 2021, doi: 10.1016/j.copsyc.2021.08.021.
- [27] B. Jaeger dan M. van Vugt, "Psychological barriers to effective altruism: An evolutionary perspective," *Curr. Opin. Psychol.*, vol. 44, hal. 130–134, Apr 2021, doi: 10.1016/j.copsyc.2021.09.008.